

Kementerian PUPR Targetkan 4 PLBN di Kalimantan Utara Rampung Desember 2022



www.finance.detik.com

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menyelesaikan pembangunan empat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) guna meningkatkan daya saing nasional, pemerataan hasil pembangunan sekaligus mengurangi disparitas, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal).

Keempat PLBN ditargetkan selesai Desember 2022, yakni PLBN Terpadu Long Nawang di Kabupaten Malinau dan tiga di Kabupaten Nunukan yakni Long Midang, Labang, dan Sei Pancang.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan PLBN tidak hanya bertujuan untuk pos lintas batas negara, namun juga akan didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dengan demikian kehadiran PLBN akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

"Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan," kata Basuki dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/2).

Pembangunan PLBN Terpadu Long Nawang telah dimulai pada 3 September 2020 dengan progres 33,49% dan ditargetkan selesai 25 Desember 2022. Anggaran pembangunan PLBN bersumber dari APBN senilai Rp 225,3 miliar. PLBN ini berada di Kabupaten Malinau yang berbatasan langsung dengan Long Busang di Sarawak, Malaysia. Ruang lingkup pekerjaan yang tengah diselesaikan meliputi bangunan utama,

gudang, mes pegawai, tower air, gerbang Tasbara, masjid, *foodcourt*, *power house* dan plumbing (MEP), lanskap, dan bangunan penunjang.

Selanjutnya PLBN Terpadu Long Midang di Kabupaten Nunukan mulai dikerjakan pada 8 Oktober 2020 dan direncanakan selesai 25 September 2023 dengan progres fisik 5,63%.

Pekerjaan yang dilaksanakan hampir sama dengan PLBN Terpadu lain berupa bangunan inti dan fasilitas penunjang lainnya dengan anggaran sebesar Rp 200,7 miliar. Pekerjaan pembangunan PLBN Terpadu Long Midang mengalami beberapa kendala di antaranya akses mobilisasi peralatan dan material melalui jalur darat yang belum tersedia dan sempat mengalami penurunan permukaan tanah dan longsor di lereng sebelum kegiatan *land clearing* dan galian.

PLBN Terpadu lainnya di Kabupaten Nunukan adalah PLBN Labang yang dikerjakan sejak 25 November 2020 dan ditargetkan selesai 14 Desember 2022. Biaya pembangunan PLBN ini sebesar Rp 210,7 miliar dengan progres konstruksi 27,95%. Pekerjaan yang tengah diselesaikan meliputi bangunan pemeriksaan, mes pegawai, kantor pegawai, tower air, rumah pompa (GWT), *power house*, tambatan perahu, Tempat Pembuangan Sampah (TPS), mekanikal elektrik dan *plumbing* (MEP), lanskap, dan bangunan penunjang.

Terakhir, PLBN Terpadu Sei Pancang atau biasa disebut Sei Nyamuk yang juga berada di Kabupaten Nunukan. PLBN ini berada Kecamatan Sebatik Utara yang dapat diakses menggunakan *speed boat* dari Kota Tarakan dengan waktu tempuh sekitar 3 jam. PLBN Terpadu Sei Pancang memiliki luas lahan 68.169 m² dibangun zona inti dan zona pendukung yang meliputi bangunan utama setinggi 3 lantai seluas 5.613 m², mes pegawai setinggi 2 lantai dengan luas 1.904 m², dan Wisma Indonesia setinggi 2 lantai seluas 1.888 m².

Pembangunan PLBN ini mulai dikerjakan pada 24 Februari 2020 dengan progres 82,1% dan ditargetkan selesai 13 Juni 2022. PLBN Sei Pancang juga mengembangkan konsep infrastruktur hijau melalui penataan lanskap, penanaman pohon dan rumput serta *roof garden* untuk bangunan bertingkat dengan total anggaran konstruksi sebesar Rp 248,58 miliar.

Sumber Berita:

- nasional.kontan.co.id; Kementerian PUPR Targetkan 4 PLBN di Kalimantan Utara Rampung Desember 2022; Minggu, 6 Februari 2022;
- finance.detik.com; 4 PLBN Pintu Gerbang Masuk RI Dibangun di Kaltara; Sabtu, 5 Februari 2022;

- beritasatu.com; 4 PLBN Terpadu di Kalimantan Utara Didorong Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru; Sabtu, 5 Februari 2022.

Catatan :

- a. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara, pada:
 1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Pos Lintas Batas Negara yang selanjutnya disingkat PLBN adalah tempat pemeriksaan dan pelayanan lintas batas negara.
 2. Pasal 2 menyatakan bahwa pedoman pengelolaan PLBN meliputi organisasi dan tata kerja; administrasi umum; fasilitas pelayanan lintas batas negara; kebersihan dan keamanan; dan pengembangan Kawasan PLBN.
- b. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan:
 1. Pertama, menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mempercepat pembangunan 11 (sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, yakni:
 - a. ...
 - d. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Sei Nyamuk, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara
 - e. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Labang, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara
 - f. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Long Midang, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara
 - g. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara
 - h. ...
 2. Keempat, Pembiayaan pelaksanaan percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan sarana prasarana penunjang di Kawasan perbatasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang tidak mengikat yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.